



Sanidaga Ungkap Rencana Perombakan Posisi Pejabat di DKI

Anies memanggil SKPD yang serapan anggarannya sangat rendah.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengungkapkan rencana perombakan posisi pejabat pada pertengahan April mendatang. Langkah ini diambil akibat rendahnya serapan anggaran. "Paritia selaksinya sudah mulai dibentuk dan sudah ada pertemuan awal," kata dia.

Penyerapan anggaran di DKI Jakarta tahun ini masih jauh dari target. Sandiaga pernah mencatatkan penyerapan anggaran itu sebesar Rp 20 triliun per triwulan. Namun, hingga kemarin, yang terserap baru Rp 4,7 triliun atau 9,4 persen dari nilai APBD tahun ini yang sebesar Rp 77,1 triliun.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Yuznada Faizal, mengakui tidak bisa menyerap tinggi anggaran pada triwulan pertama. Alasannya, dari pagu anggaran Rp 2,03 triliun, sebesar 97 persennya merupakan belanja langsung, seperti pembangunan infrastruktur yang pengerjaannya melibatkan pihak lain,

kontraktor.

"Jadi, itu (tingkat serapan anggaran) bergantung pada seberapa cepat mereka (kontraktor) menyelesaikan pekerjaan dan mengajukan tagihannya," ujar dia ketika ditemui di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Yuznada menurunkan hanya mematok target serapan anggaran sebesar 1,03 persen dengan realisasi 2,87 persen pada bulan lalu. Target itu dinilainya realistis. "Karena kontraktor biasanya baru menagih (pembayaran) kalau sudah ada progres fisik 25 persen."

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Teguh Hendrawan, menuturkan baru merealisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 50,3 miliar atau 1,78 persen dari pagu anggaran Rp 2,8 triliun per akhir bulan lalu. Padahal, targetnya sebesar Rp 747,5 miliar atau 22,3 persen.

Alasan yang dikemukakan Teguh, Rp 1,6 triliun dari pagu dianggarkan untuk pembebasan lahan normalisasi sungai dan

pembangunan waduk. Pembebasan lahan itu, ia menambahkan, memerlukan kecernatan. "Kami enggak mau muncul gugatan."

Kepala Dinas Kehutanan DKI Jakarta, Djafer Muchlisin, juga mengungkapkan Rp 1,95 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp 2,24 triliun digunakan untuk pengadaan tanah ruang terbuka hijau. Walhasil, hingga akhir bulan lalu, anggaran yang terserap oleh Dinas Kehutanan baru Rp 62,5 miliar atau 2,58 persen.

Djafer menuturkan tak berani pasang target tinggi penyerapan anggaran pada triwulan pertama. "Pembebasan lahan ini enggak bisa langsung eksekusi. Kami perli. hati-hati dan koordinasi dengan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) lain," tutur dia.

Secara terpisah, Gubernur Anies Baswedan menyatakan telah memanggil semua SKPD untuk membicarakan serapan anggaran tersebut. Menurut Anies, serapan terendah ada di Dinas Sumber Daya Air. "Padahal, anggarannya besar" ujar dia.

Selain itu, Anies tidak mengizinkan pembayaran pengadaan tanah dilakukan secara tunai. Tujuannya, agar terhindar dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Sebelumnya, BPK menganggap pengadaan tanah Waduk Pondok Manggon III, Cilangkap, Jakarta Timur senilai Rp 32,008 miliar tidak bisa diyakini kewajarannya.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasctio Edi Marsudi, juga akan memanggil tim anggaran pemerintah daerah untuk menanyakan belum maksimalnya serapan anggaran tahun ini. Menurut dia, pemerintah seharusnya telah mengetahui apa saja kebutuhan yang akan dibelanjakan saat musyawarah perencanaan pembangunan. "Kami akan koreksi (rendahnya serapan anggaran)," ujar politikus PDI Perjuangan itu.

● IRISAN HASYIM | ELJAH PERMANO

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Sanidaga Ungkap Rencana Perombakan Posisi Pejabat di DKI

